



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KEUANGAN UAKPA KPKNL SORONG TA 2022 (AUDITED)



Pemulihan  
Ekonomi dan  
Reformasi  
Struktural



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sorong, 04 Mei 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Sorong



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan- Pengungkapan Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

**GEDUNG KEUANGAN NEGARA SORONG,  
JL. BASUKI RAHMAT KM.7 KOTA SORONG  
TELEPON 0951 324868**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sorong, 04 Mei 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Sorong



Antonius Wibowo

NIP. 19740902 200012 1 001

Laporan Keuangan Audited Tahunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.662.733.737 atau mencapai 128,65 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.846.957.000.

Realisasi Belanja Negara pada selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.283.434.689 atau mencapai 90,65 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.410.958.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset disajikan sebesar Rp13.150.884.821 yang terdiri dari: Aset Lancar (neto) sebesar Rp86.043.096; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp13.064.841.726; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. Nilai Kewajiban sebesar Rp74.228.063 dan nilai Ekuitas sebesar Rp13.076.656.759.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan operasional, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.661.733.737, sedangkan jumlah beban kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.612.851.134 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.048.882.603. Kegiatan Non Operasional Surplus sebesar Rp502.822 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp2.049.385.425.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp13.198.931.589 ditambah Surplus-LO sebesar Rp2.049.385.425 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp143.586.918 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.315.247.173 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp13.076.656.759.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022		% thd Angg	31 DESEMBER 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.846.957.000	3.662.733.737	128,65	3.409.245.791
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.846.957.000</b>	<b>3.662.733.737</b>	<b>128,65</b>	<b>3.409.245.791</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	1.410.958.000	1.283.434.689	90,96	1.184.880.958
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	450.180.404
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.410.958.000</b>	<b>1.283.434.689</b>	<b>90,96</b>	<b>1.635.061.362</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## II. NERACA

### KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022	TA 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	74.228.062	28.145.408
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	11.815.033	18.277.210
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>86.043.095</b>	<b>46.422.618</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	8.801.994.000	8.801.994.000
Peralatan dan Mesin	C.15	4.465.575.692	4.475.981.637
Gedung dan Bangunan	C.16	4.146.029.000	3.862.703.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	365.826.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	15.590.690	15.590.690
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.364.347.656)	(4.341.440.948)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>13.064.841.726</b>	<b>13.180.654.379</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>13.160.884.821</b>	<b>13.227.076.997</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	74.228.062	28.145.408
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.27	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>74.228.062</b>	<b>28.145.408</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>74.228.062</b>	<b>28.145.408</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	13.076.656.759	13.198.931.589
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>13.076.656.759</b>	<b>13.198.931.589</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>13.160.884.821</b>	<b>13.227.076.997</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022	TA 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN PERPAJAKAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.661.733.737	3.399.540.336
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.661.733.737</b>	<b>3.399.540.336</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	74.898.333	51.927.824
Beban Barang dan Jasa	D.4	746.192.990	757.686.954
Beban Pemeliharaan	D.5	248.265.728	193.606.934
Beban Perjalanan Dinas	D.6	220.539.815	169.137.970
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	322.954.268	375.106.878
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.612.851.134</b>	<b>1.547.466.560</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>2.048.882.603</b>	<b>1.852.073.776</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Nonlancar	D.11	502.822	7.909.044
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>502.822</b>	<b>7.909.044</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>2.049.385.425</b>	<b>1.859.982.820</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.12	-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) LO</b>		<b>2.049.385.425</b>	<b>1.859.982.820</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
EKUITAS AWAL	E.1	13.198.931.589	13.112.732.698
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	2.049.385.425	1.859.982.820
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI MENDASAR	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	143.586.918	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	143.586.918	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(2.315.247.173)	(1.773.783.929)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(122.274.830)	86.198.891
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>13.076.666.769</b>	<b>13.198.931.589</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong didirikan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong diharapkan kualitas laporan Kementerian Negara/Lembaga dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong hingga saat ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong berlokasi di Gedung Keuangan Negara Sorong, Jl. Basuki Rahmat KM. 7 Kota Sorong, Papua Barat – 98419, bersama-sama dengan Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diperbarui oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Keuangan, telah dibentuk Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tugas-tugas seperti penyelesaian mengenai usul penghapusan, penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pengelolaan barang milik negara, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kekayaan negara lainnya, piutang, dan lelang dari Kementerian Negara/Lembaga selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan,

dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahunan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

#### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	2. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	3. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **a. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah); dan
  - c) pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**b. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a) Tanah;
  - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**a. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**b. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud (ATB), tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer.	4
<i>Franchise.</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya dana tambahan program sertifikasi SBSK di seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.347.934.000	1.410.958.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.347.934.000</b>	<b>1.410.958.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp3.662.733.737*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.662.733.737 atau mencapai 128,65% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.846.957.000. Pendapatan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong adalah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2022*

Uraian	31 DESEMBER 2022		
	Estimasi	Realisasi	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	1.000.000	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.130.000	-	-
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1.426.000.000	1.231.169.635	86,34
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.403.000.000	2.429.072.466	173,13
Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12.827.000	1.491.636	11,63
<b>Jumlah</b>	<b>2.846.957.000</b>	<b>3.662.733.737</b>	<b>128,65</b>

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar 7,44% dibandingkan 31 Desember 2021.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 31 Desember 2022 dan 2021*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2022	Realisasi 31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	1.000.000	8.200.000	(87,80)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	4.000.000	(100,00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	3.661.733.737	3.395.540.336	7,84
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	1.505.455	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.662.733.737</b>	<b>3.409.245.791</b>	<b>7,44</b>

*Realisasi Belanja Negara  
Rp1.283.434.689*

## **B.2 Belanja**

Realisasi Belanja Tahunan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.283.434.689 atau 90,96% dari anggaran belanja sebesar Rp1.410.958.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2022*

Uraian	30 Desember 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.410.958.000	1.283.434.689	90,96
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.410.958.000</b>	<b>1.283.434.689</b>	<b>90,96</b>

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar 21,51% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya belanja modal pada tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.283.434.689	1.184.880.958	8,32
Belanja Modal	-	450.180.404	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.283.434.689</b>	<b>1.635.061.362</b>	<b>(21,51)</b>

*Belanja Pegawai  
Rp0*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pembayaran belanja pegawai dilakukan secara terpusat melalui Kantor Pusat DJKN.

*Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2022 dan  
31 Desember 2021*

URAIAN	30 SEPTEMBER 2022	30 SEPTEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0,00
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0,00
Belanja Lembur	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	<b>0,00</b>

*Belanja Barang  
Rp1.283.434.689*

### **B.4. Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.283.434.689 dan Rp1.184.880.958 Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 8,32% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini antara lain

disebabkan naiknya belanja barang operasional, belanja persediaan, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas sepanjang TA 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

*Perbandingan Belanja 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Barang Operasional	672.887.361	689.803.033	(2,45)
Belanja Barang Non Operasional	46.450.000	25.214.906	84,22
Belanja Jasa	26.855.629	42.669.015	(37,06)
Belanja Pemeliharaan	248.265.728	193.606.934	28,23
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	220.539.815	169.137.970	30,39
Belanja Barang Persediaan	68.436.156	64.449.100	6,19
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.283.434.689</b>	<b>1.184.880.958</b>	<b>8,32</b>
Pengembalian Belanja	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.283.434.689</b>	<b>1.184.880.958</b>	<b>8,32</b>

*Belanja Modal  
Rp0*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp450.180.404. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar 100%

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2022 dan  
31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	450.180.404	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>450.180.404,00</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>450.180.404</b>	<b>(100,00)</b>

*Belanja Modal  
Tanah  
Rp0*

**B.5.1. Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan 31 Desember

2021. Hal ini disebabkan karena tidak adanya Belanja Modal Tanah pada TA 2022.

*Perbandingan Belanja Modal Tanah 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

*Rp0*

### **B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2021 sebesar Rp450.180.404.

*Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	450.180.404,00	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	<b>450.180.404,00</b>	<b>(100,00)</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>450.180.404,00</b>	<b>(100,00)</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

*Rp0*

### **B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

*Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	-

Belanja Modal

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp0

#### B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan realisasi tahun anggaran lalu.

*Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Jaringan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

Belanja Modal

Lainnya

Rp0

#### B.5.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan 31 Desember 2021.

*Perbandingan Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-

Belanja Bantuan

Sosial

Rp0

#### B.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan TA 2021.

*Perbandingan Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2022 dan  
31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0

### C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2022 dan  
31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp74.228.062

### C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp74.228.062 dan Rp28.145.408. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas

dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas yang merupakan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
-Kas Lainnya dan Setara Kas	74.228.062	28.145.408
<b>Jumlah</b>	<b>74.228.062</b>	<b>28.145.408</b>

*Piutang PNBP  
Rp0*

#### **C.4. Piutang PNBP**

Saldo piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
-Piutang PNBP	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Bagian Lancar  
Tagihan TP/TGR  
Rp0*

#### **C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
-Bagian Lancar TP/TGR	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar  
TPA  
Rp0

### C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
-Bagian Lancar TPA	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih–Piutang  
Lancar  
Rp0

### C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur, dengan sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>		<b>-</b>
<b>Jumlah Piutang Lancar</b>	<b>0</b>	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>-</b>

Belanja Dibayar  
di Muka  
Rp0

### C.8. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih

harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Belanja Dibayar di Muka	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima  
Rp0*

### **C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Pendapatan Masih Harus Diterima	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan  
Rp11.815.033*

### **C.10. Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp11.815.033,- dan Rp18.277.210,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Persediaan	11.815.033	18.277.210
<b>Jumlah</b>	<b>11.815.033</b>	<b>18.277.210</b>

*Tagihan TP/TGR*

*Rp0*

### **C.11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Debitur	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
-Tagihan TP/TGR	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.12. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Debitur	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
-Tagihan TPA	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih–Piutang  
Jangka Panjang  
Rp0*

### **C.13. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang  
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>	-	<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-

Tanah

Rp8.801.994.000

**C.14. Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.801.994.000 dan Rp8.801.994.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 DESEMBER 2022</b>	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2021</b>	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah*

Luas	Lokasi	Nilai
1.784 m2	Jl Jenderal Sudirman No.8, Kota Sorong	8.801.994.000
<b>Jumlah</b>		<b>8.801.994.000</b>

Peralatan dan

Mesin

Rp4.465.575.692

**C.15. Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.465.575.692 dan Rp4.475.981.637. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>4.475.981.637</b>
Mutasi tambah:	232.939.007
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	232.939.007
Koreksi Non Revaluasi	0
Mutasi kurang:	243.344.952
Reklasifikasi Keluar	0
Transfer Keluar	243.344.952
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>4.465.575.692</b>

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp4.146.029.000*

### **C.16. Gedung dan Bangunan**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp4.146.029.000 dan Rp3.862.703.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>3.862.703.000</b>
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	283.326.000
Mutasi kurang:	
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>4.146.029.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(556.266.352)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi,  
dan Jaringan  
Rp0*

### **C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp365.826.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>365.826.000</b>
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi Keluar	365.826.000
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>-</b>

Terdapat mutasi transaksi pengurangan jalan, irigasi, dan jaringan karena koreksi nilai aset non revaluasi dengan adanya reklasifikasi aset Bangunan Penguat Tebing/Pantai menjadi Bangunan Terbuka Lainnya dan Jaringan Telepon di Atas Tanah Kapasitas Kecil menjadi Alat Kantor Lainnya.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp15.590.690*

### **C.18. Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

adalah Rp15.590.690 dan Rp15.590.690. Aset Tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>15.590.690</b>
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>15.590.690</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	<b>15.590.690</b>

Tidak terdapat mutasi transaksi pengurangan aset tetap lainnya.

Rincian aset tetap lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan*  
Rp0

**C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan per tanggal pelaporan.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
Rp4.364.347.656

**C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp4.364.347.656 dan Rp4.341.440.948. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.465.575.692	3.889.575.885	575.999.807
2	Gedung dan Bangunan	4.146.029.000	474.771.771	3.671.257.229
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	15.590.690	-	15.590.690
<b>Jumlah</b>		<b>8.627.195.382</b>	<b>4.364.347.656</b>	<b>4.262.847.726</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak  
Berwujud  
Rp0

### C.21. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong tidak memiliki Aset Tak Berwujud. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	-
Mutasi tambah:	
-	-
Mutasi kurang:	
-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2022</b>	-

Tidak ada transaksi penambahan atau pengurangan per 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Aset Tak Berwujud

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
-Aset Tak Berwujud	-
<b>Jumlah</b>	-

Aset Lain-lain  
Rp0

### C.22. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2022</b>	<b>15.590.690</b>
Mutasi tambah:	
- Koreksi	-
Mutasi kurang:	
- Koreksi	-
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>15.590.690</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya

### C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai

Rp0

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tetap Lainnya	15,590,690	-	15,590,690
	<b>Jumlah</b>	<b>15,590,690</b>	<b>-</b>	<b>15,590,690</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp0

**C.24. Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp74.228.063

**C.25. Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp74.228.063 dan Rp28.145.408. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rinciannya Kelebihan di Rekening Penampungan Lelang sejumlah Rp11.796.670 yang berasal dari kelebihan transaksi pelunasan lelang yang terakumulasi dari tahun sebelumnya , tetapi belum ada permohonan pengembalian dari pemenang lelang/penyetor, Hasil Bersih Lelang Barang Sitaan dari Dirjen Bea Cukai/Kejaksaan/Kepolisian/Instansi Pemerintah Lainnya sejumlah Rp14.085.396 yang berasal dari hasil penjualan barang sitaan (berupa cek) yang sudah diserahkan ke penjual (Polres Raja Ampat), tetapi belum dicairkan sampai sekarang karena dengan alasan menjadi objek barang bukti di persidangan, Uang Jaminan Lelang yang Belum

Diambil/Diperhitungkan sejumlah Rp48.202.362, dan Kelebihan di Rekening Penampungan Piutang sejumlah Rp143.635 yang berasal dari kelebihan penyetoran biad debitor piutang negara. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Posisi Saldo Kas Bendahara Penerimaan KPKNL Sorong per 31 Desember 2022. Atas Kelebihan Utang kepada Pihak Ketiga tersebut saat ini sedang dilakukan proses verifikasi dan konfirmasi kepada masing-masing pihak dengan tahapan sesuai petunjuk dalam Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara nomor ND-4517/KN.1/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Monitoring Penyelesaian Saldo Dana Mengendap Periode Triwulan III Tahun 2022 dan Implementasi Penyelesaian Saldo Dana Mengendap Periode Triwulan IV Tahun 2022. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	74.228.063	Dana Pihak
<b>Total</b>	-	-

*Pendapatan*

*Diterima di Muka*

*Rp0*

**C.26. Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka*

Uraian	Jumlah
Pendapatan Diterima di Muka	-
<b>Total</b>	-

*Beban yang*

*Masih Harus*

*Dibayar*

**C.27. Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan

Rp0

kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
Beban yang Masih Harus Dibayar	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ekuitas

Rp13.076.656.759

**C.28. Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.076.656.759,- dan Rp13.198.931.589,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas	13.076.656.759	13.198.931.589	- 122.274.830
<b>Jumlah</b>	<b>13.076.656.759</b>	<b>13.198.931.589</b>	<b>- 122.274.830</b>

*Pendapatan PNB* **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

*Rp3.662.733.737* **D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.662.733.737 dan Rp2.135.864.272. Pendapatan tersebut meningkat sebesar 7,46% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2022 dan  
31 Desember 2021*

<b>Uraian</b>	<b>31 DESEMBER 2022</b>	<b>31 DESEMBER 2021</b>	<b>Naik/ (Turun) %</b>
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN	1.000.000	8.200.000	(87,80)
Pendapatan Jasa Lainnya	-	4.000.000	(100,00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan	3.662.733.737	3.395.540.336	7,87
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	1.505.455	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.663.733.737</b>	<b>3.409.245.791</b>	<b>7,46</b>

Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin serta pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, sementara pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan keuangan berasal dari pendapatan bea lelang oleh Kelas II, terakhir pendapatan lain-lain yang berasal dari pendapatan denda lainnya per 31 Desember 2022.

*Beban Pegawai* **D.2. Beban Pegawai**

*Rp0* Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	0,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	0,00
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	0,00
Belanja Uang Makan PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	-	-	0,00
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	0,00
Belanja Lembur	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	0,00
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	-	-	<b>0,00</b>

*Beban Persediaan*

*Rp68.436.156*

**D.3. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp68.436.156 dan Rp64.449.100. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	68.436.156	64.449.100	6,19
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>68.436.156</b>	<b>64.449.100</b>	<b>6,19</b>

*Beban Barang*

*dan Jasa*

*Rp746.192.990*

**D.4. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp746.192.990 dan Rp757.686.954. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena

penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya pengurangan pada Beban Bahan, Beban Honor Output Kegiatan, Beban Barang Non Operasional Lainnya, dan Beban Sewa, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	407.994.932	387.150.474	5,38
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Satuan Kerja	18.736.000	53.753.804	(65,14)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	47.500.829	47.478.737	0,05
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144.480.000	143.230.000	0,87
Beban Barang Operasional Lainnya	54.175.600	58.190.018	(6,90)
Beban Bahan	26.200.000	25.214.906	3,91
Beban Honor Output Kegiatan	20.250.000	-	0,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Beban Langganan Telepon	20.480.629	20.156.015	1,61
Beban Sewa	-	-	0,00
Beban Jasa Profesi	-	1.800.000	(100,00)
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid-19	6.375.000	20.713.000	(69,22)
<b>Jumlah</b>	<b>746.192.990</b>	<b>757.686.954</b>	<b>(1,52)</b>

*Beban*

*Pemeliharaan*

*Rp248.265.728*

#### **D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp248.265.728 dan Rp193.606.934. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya perbedaan beban pemeliharaan peralatan dan mesin dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik/ (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102.273.100	104.000.000	(1,66)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145.992.628	89.606.934	62,93
<b>Jumlah</b>	<b>248.265.728</b>	<b>193.606.934</b>	<b>28,23</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp220.539.815,

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp220.539.815 dan Rp169.137.970. Beban perjalanan dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh menurunnya beban perjalanan biasa dan beban perjalanan dinas dalam kota. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	197.289.815	147.249.970	33,98
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.250.000	21.888.000	6,22
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>220.539.815</b>	<b>169.137.970</b>	<b>30,39</b>

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

#### D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Beban Bantuan Sosial Rp0

#### D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada kenaikan atau penurunan per 31 Desember 2022. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp322.954.268

#### D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp322.954.268 dan Rp375.106.878. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan, sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	233.099.400	234.908.727	(0,77)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89.854.868	84.130.051	6,80
Beban Penyusutan Irigasi	-	51.943.100	(100,00)
Beban Penyusutan Jaringan	-	4.125.000	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	-	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>322.954.268</b>	<b>375.106.878</b>	<b>(13,90)</b>
-	-	-	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp0

#### **D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Nonlancar	-	-	0,00
<b>Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp502.822

#### **D.11. Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
-Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	502.822	7.909.044	(93,64)
<b>Jumlah Pos Luar Biasa</b>	<b>502.822</b>	<b>7.909.044</b>	<b>(93,64)</b>

Pos Luar Biasa  
Rp0

#### **D.12. Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan, dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021*

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	NAIK (TURUN) %
-Pos Luar Biasa	-	-	0,00
<b>Jumlah Pos Luar Biasa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*

Rp13.198.931.589

### **E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.198.931.589 dan Rp13.112.732.698.

*Surplus LO*

Rp2.049.385.425

### **E.2. Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.049.385.425 dan Rp1.859.982.820. Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan*

*Akuntansi/*

*Kesalahan Mendasar*

*Rp0*

*Penyesuaian Nilai*

*Aset*

*Rp0*

### **E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan Mendasar pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

#### **E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp0*

#### **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan*

*31 Desember 2021*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Nilai Koreksi</b>
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Selisih Revaluasi

Aset Tetap

Rp0

Koreksi Aset Tetap

Non Revaluasi

Rp0

Koreksi Lain-lain

Rp0

Transaksi Antar

Entitas

(Rp2.315.247.173)

Ekuitas Akhir

Rp13.076.656.759

#### **E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### **E.4.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

#### **E.4.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

*Rincian Koreksi Lain-lain*

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

#### **E.5. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar (Rp2.315.247.173) dan (Rp1.773.783.929). Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Naik (Turun) %
Ditagihkan Ke Entitas Lain	1.283.434.689	1.635.061.362	-22%
Diterima Dari Entitas Lain	(3.662.733.737)	(3.409.245.791)	7%
Transfer Keluar	-	-	0%
Transfer Masuk	64.051.875	400.500	15893%
<b>Jumlah</b>	<b>(2.315.247.173)</b>	<b>(1.773.783.929)</b>	<b>31%</b>

#### **E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp13.076.656.759 dan Rp13.198.931.589.

Uraian	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Perubahan Ekuitas (Kenaikan/Penurunan)
Ekuitas	13.076.656.759	13.198.931.589	- 122.274.830
<b>Jumlah</b>	<b>13.076.656.759</b>	<b>13.198.931.589</b>	<b>- 122.274.830</b>

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada Tahunan 2022 terdapat mutasi di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong, sejumlah 3 Aparatur Sipil Negara yang keluar beserta 8 Aparatur Sipil Negara yang masuk. Terdapat 1 Aparatur Sipil Negara yang lolos tugas belajar.

### **F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-352/KN/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan telah mutasinya pegawai atas nama Greetje Maritje Irene Maweikere, terdapat perubahan Pejabat Pembuat Komitmen. Akibat hal tersebut, terjadi penggantian Pejabat Pengelola yaitu sebagai berikut:

Satker	Jabatan	Semula	Menjadi
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sorong	Kuasa Pengguna Anggaran	Indra Eka Putra	Antonius Arie Wibowo
	Pejabat Pembuat Komitmen	Greetje Maritje Irene M.	Antonius Arie Wibowo
	Pejabat Penandatanganan SPM	Ade Setiana	Ade Setiana
	Bendahara	Bhrama Ullul Azmi	Bhrama Ullul Azmi



KEMENTERIAN KEUANGAN  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
KPKNL Sorong

**DJKN**

**KASUARI**



[il.ink/KasuariKPKNLSorong](https://il.ink/KasuariKPKNLSorong)





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN 015  
**ESELON I** : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09  
**SATUAN KERJA** : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG 537990

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 7:49 PM

Halaman : 2

lap\_ira\_face\_satker\_komparatif

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>1,410,958,000</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>127,523,311</b>	<b>91</b>	<b>1,708,123,000</b>	<b>1,635,061,362</b>	<b>73,061,638</b>	<b>96</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

Keterangan :

FINAL

SORONG, 5 Mei 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA KANTOR

ANTONIUS ARIE WIBOWO  
197809022000121001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 3300 ) PAPUA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 537990 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 5:55 PM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,661,733,737	3,399,540,336	262,193,401	7.713
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,661,733,737	3,399,540,336	262,193,401	7.713
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,661,733,737	3,399,540,336	262,193,401	7.713
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	74,898,333	51,927,824	22,970,509	44.235
Beban Barang dan Jasa	746,192,990	757,686,954	(11,493,964)	(1.517)
Beban Pemeliharaan	248,265,728	193,606,934	54,658,794	28.232
Beban Perjalanan Dinas	220,539,815	169,137,970	51,401,845	30.39
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 3300 ) PAPUA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 537990 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

Tgl Data : 05/05/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 5:55 PM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	322,954,268	375,106,878	(52,152,610)	(13.903)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>1,612,851,134</b>	<b>1,547,466,560</b>	<b>65,384,574</b>	<b>4.225</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>2,048,882,603</b>	<b>1,852,073,776</b>	<b>196,808,827</b>	<b>10.626</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	502,822	7,909,044	(7,406,222)	(93.642)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,000,000	8,200,000	(7,200,000)	(87.805)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	497,178	290,956	206,222	70.877
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>502,822</b>	<b>7,909,044</b>	<b>(7,406,222)</b>	<b>(93.642)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>2,049,385,425</b>	<b>1,859,982,820</b>	<b>189,402,605</b>	<b>10.183</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>2,049,385,425</b>	<b>1,859,982,820</b>	<b>189,402,605</b>	<b>10.183</b>

---

Keterangan :

FINAL

SORONG, 5 Mei 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA KANTOR

ANTONIUS ARIE WIBOWO  
197809022000121001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
 (DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 3300 ) PAPUA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 537990 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 7:40 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	13,198,931,589	13,112,732,698	86,198,891	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	2,049,385,425	1,859,982,820	189,402,605	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	143,586,918	0	143,586,918	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	143,586,918	0	143,586,918	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(2,315,247,173)	(1,773,783,929)	(541,463,244)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(122,274,830)	86,198,891	(208,473,721)	-
EKUITAS AKHIR	13,076,656,759	13,198,931,589	(122,274,830)	-

Keterangan :

FINAL

SORONG, 5 Mei 2023

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR

ANTONIUS ARIE WIBOWO

197809022000121001

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 3300 ) PAPUA BARAT**  
**SATUAN KERJA : ( 537990 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 7:50 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas Lainnya dan Setara Kas	74,228,063	28,145,408	46,082,655	163.73
Persediaan	11,815,033	18,277,210	(6,462,177)	(35.36)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>86,043,096</b>	<b>46,422,618</b>	<b>39,620,478</b>	<b>85.35</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	8,801,994,000	8,801,994,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,465,575,692	4,475,981,637	(10,405,945)	(0.23)
Gedung dan Bangunan	4,146,029,000	3,862,703,000	283,326,000	7.33
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	365,826,000	(365,826,000)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	15,590,690	15,590,690	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,364,347,656)	(4,341,440,948)	(22,906,708)	0.53
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>13,064,841,726</b>	<b>13,180,654,379</b>	<b>(115,812,653)</b>	<b>(0.88)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>13,150,884,822</b>	<b>13,227,076,997</b>	<b>(76,192,175)</b>	<b>(0.58)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	74,228,063	28,145,408	46,082,655	163.73
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>74,228,063</b>	<b>28,145,408</b>	<b>46,082,655</b>	<b>163.73</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>74,228,063</b>	<b>28,145,408</b>	<b>46,082,655</b>	<b>163.73</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	13,076,656,759	13,198,931,589	(122,274,830)	(0.93)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>13,076,656,759</b>	<b>13,198,931,589</b>	<b>(122,274,830)</b>	<b>(0.93)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>13,076,656,759</b>	<b>13,198,931,589</b>	<b>(122,274,830)</b>	<b>(0.93)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>13,150,884,822</b>	<b>13,227,076,997</b>	<b>(76,192,175)</b>	<b>(0.58)</b>

Keterangan :

FINAL

SORONG, 5 Mei 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA KANTOR

ANTONIUS ARIE WIBOWO  
197809022000121001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : ( 3300 ) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : ( 537990 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG SORONG

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 7:56 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	74,228,063	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	11,815,033	0
0.0	131111	Tanah	8,801,994,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,465,575,692	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	4,146,029,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,590,690	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,889,575,885
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	474,771,771
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	74,228,063
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,283,434,689
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,662,733,737	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	64,051,875
0.0	391111	Ekuitas	0	13,198,931,589
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	143,586,918
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,000,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,231,169,635
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,429,072,466
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,491,636
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	407,994,932	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,736,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	54,175,600	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	47,500,829	0
3.0	521211	Beban Bahan	26,200,000	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	20,250,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	20,480,629	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6,375,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,273,100	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145,992,628	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	197,289,815	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,250,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	233,099,400	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89,854,868	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	74,898,333	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	497,178	0
<b>JUMLAH</b>			<b>22,791,314,527</b>	<b>22,791,314,527</b>

Keterangan :

FINAL

SORONG, 5 Mei 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA KANTOR

ANTONIUS ARIE WIBOWO  
197809022000121001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2022 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : ( 09 ) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : ( 3300 ) PAPUA BARAT

SATUAN KERJA : ( 537990 ) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN  
LELANG SORONG

Tgl Data : 05/05/23 6:00 PM

Tgl Cetak : 05/05/23 8:00 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	407,994,932	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	47,500,829	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,250,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	26,200,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	68,436,156	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,000,000
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	2,429,072,466
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	6,375,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	197,289,815	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	54,175,600	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20,250,000	0
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,283,434,689
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	20,480,629	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	102,273,100	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	145,992,628	0
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	1,231,169,635
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,736,000	0
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,662,733,737	0
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,491,636
<b>JUMLAH</b>			<b>4,946,168,426</b>	<b>4,946,168,426</b>

Keterangan :

FINAL

SORONG, 5 Mei 2023  
Penanggung Jawab UAKPA  
KEPALA KANTORANTONIUS ARIE WIBOWO  
197809022000121001

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
 PER 1 JANUARI 2022 (SALDO AWAL)  
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015  
 UNIT ORGANISASI : 09  
 WILAYAH/PROVINSI : 3300  
 SATUAN KERJA : 537990

KEMENTERIAN KEUANGAN  
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA  
 PAPUA BARAT  
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG

Tgl. Cetak 05/05/2023 8:06 PM  
 lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	28,145,408	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	18,277,210	0
0.0	131111	Tanah	8,801,994,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,475,981,637	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,862,703,000	0
0.0	134112	Irigasi	283,326,000	0
0.0	134113	Jaringan	82,500,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	15,590,690	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,730,437,127
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	336,308,421
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	231,382,900
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	43,312,500
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	28,145,408
0.0	391111	Ekuitas	0	13,198,931,589
<b>JUMLAH</b>			<b>17,568,517,945</b>	<b>17,568,517,945</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 017  
**SATUAN KERJA** : 537990  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**PAPUA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/23 8:06 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
Tgl Data : 5/5/23 7:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	406,309,000	408,309,000	407,994,932	0	407,994,932	99.92	314,068
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	60,000,000	60,000,000	18,736,000	0	18,736,000	31.23	41,264,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	144,480,000	144,480,000	0	144,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	58,453,000	58,453,000	54,175,600	0	54,175,600	92.68	4,277,400
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52,812,000	52,812,000	47,500,829	0	47,500,829	89.94	5,311,171
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>722,054,000</b>	<b>724,054,000</b>	<b>672,887,361</b>	<b>0</b>	<b>672,887,361</b>	<b>92.93</b>	<b>51,166,639</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	29,461,000	29,461,000	26,200,000	0	26,200,000	88.93	3,261,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,000,000	27,000,000	20,250,000	0	20,250,000	75	6,750,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	892,000	0	0	0	0	892,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>57,961,000</b>	<b>57,353,000</b>	<b>46,450,000</b>	<b>0</b>	<b>46,450,000</b>	<b>80.99</b>	<b>10,903,000</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,874,000	75,874,000	68,436,156	0	68,436,156	90.2	7,437,844
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>75,874,000</b>	<b>75,874,000</b>	<b>68,436,156</b>	<b>0</b>	<b>68,436,156</b>	<b>90.2</b>	<b>7,437,844</b>
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	28,702,000	28,702,000	20,480,629	0	20,480,629	71.36	8,221,371
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,184,000	19,184,000	6,375,000	0	6,375,000	33.23	12,809,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>48,786,000</b>	<b>48,786,000</b>	<b>26,855,629</b>	<b>0</b>	<b>26,855,629</b>	<b>55.05</b>	<b>21,930,371</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105,549,000	105,549,000	102,273,100	0	102,273,100	96.9	3,275,900
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166,410,000	164,410,000	145,992,628	0	145,992,628	88.8	18,417,372
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>271,959,000</b>	<b>269,959,000</b>	<b>248,265,728</b>	<b>0</b>	<b>248,265,728</b>	<b>91.96</b>	<b>21,693,272</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	144,706,000	209,250,000	197,289,815	0	197,289,815	94.28	11,960,185
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,594,000	25,682,000	23,250,000	0	23,250,000	90.53	2,432,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>171,300,000</b>	<b>234,932,000</b>	<b>220,539,815</b>	<b>0</b>	<b>220,539,815</b>	<b>93.87</b>	<b>14,392,185</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,347,934,000</b>	<b>1,410,958,000</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>0</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>90.96</b>	<b>127,523,311</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,347,934,000</b>	<b>1,410,958,000</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>0</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>90.96</b>	<b>127,523,311</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 017  
**SATUAN KERJA** : 537990  
**JENIS SATUAN KERJA** : KD

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**PAPUA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 05/05/23 8:04 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
Tgl Data : 5/5/23 7:12 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	406,309,000	408,309,000	407,994,932	0	407,994,932	99.92	314,068
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	60,000,000	60,000,000	18,736,000	0	18,736,000	31.23	41,264,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	144,480,000	144,480,000	144,480,000	0	144,480,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	58,453,000	58,453,000	54,175,600	0	54,175,600	92.68	4,277,400
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52,812,000	52,812,000	47,500,829	0	47,500,829	89.94	5,311,171
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>722,054,000</b>	<b>724,054,000</b>	<b>672,887,361</b>	<b>0</b>	<b>672,887,361</b>	<b>92.93</b>	<b>51,166,639</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	29,461,000	29,461,000	26,200,000	0	26,200,000	88.93	3,261,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	27,000,000	27,000,000	20,250,000	0	20,250,000	75	6,750,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	892,000	0	0	0	0	892,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>57,961,000</b>	<b>57,353,000</b>	<b>46,450,000</b>	<b>0</b>	<b>46,450,000</b>	<b>80.99</b>	<b>10,903,000</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,874,000	75,874,000	68,436,156	0	68,436,156	90.2	7,437,844
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>75,874,000</b>	<b>75,874,000</b>	<b>68,436,156</b>	<b>0</b>	<b>68,436,156</b>	<b>90.2</b>	<b>7,437,844</b>
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	28,702,000	28,702,000	20,480,629	0	20,480,629	71.36	8,221,371
522151	Belanja Jasa Profesi	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	19,184,000	19,184,000	6,375,000	0	6,375,000	33.23	12,809,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>48,786,000</b>	<b>48,786,000</b>	<b>26,855,629</b>	<b>0</b>	<b>26,855,629</b>	<b>55.05</b>	<b>21,930,371</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	105,549,000	105,549,000	102,273,100	0	102,273,100	96.9	3,275,900
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	166,410,000	164,410,000	145,992,628	0	145,992,628	88.8	18,417,372
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>271,959,000</b>	<b>269,959,000</b>	<b>248,265,728</b>	<b>0</b>	<b>248,265,728</b>	<b>91.96</b>	<b>21,693,272</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	144,706,000	209,250,000	197,289,815	0	197,289,815	94.28	11,960,185
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,594,000	25,682,000	23,250,000	0	23,250,000	90.53	2,432,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>171,300,000</b>	<b>234,932,000</b>	<b>220,539,815</b>	<b>0</b>	<b>220,539,815</b>	<b>93.87</b>	<b>14,392,185</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>1,347,934,000</b>	<b>1,410,958,000</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>0</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>90.96</b>	<b>127,523,311</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1,347,934,000</b>	<b>1,410,958,000</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>0</b>	<b>1,283,434,689</b>	<b>90.96</b>	<b>127,523,311</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 015  
**ESELON I** : 09  
**WILAYAH/PROVINSI** : 3300  
**SATUAN KERJA** : 537990

**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**DITJEN KEKAYAAN NEGARA**  
**PAPUA BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SORONG**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 05/05/23 8:05 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,000,000	0	1,000,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5,130,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	5,130,000	1,000,000	0	1,000,000	19.49
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,426,000,000	1,231,169,635	0	1,231,169,635	86.34
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,403,000,000	2,429,072,466	0	2,429,072,466	173.13
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	12,827,000	1,491,636	0	1,491,636	11.63
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	2,841,827,000	3,661,733,737	0	3,661,733,737	128.85
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,846,957,000	3,662,733,737	0	3,662,733,737	128.65
	JUMLAH PENDAPATAN	2,846,957,000	3,662,733,737	0	3,662,733,737	128.65